REKONSTRUKSI YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PERUSAHAAN RINTISAN (*STARTUP*) BERBASIS TEKNOLOGI YANG DINYATAKAN PAILIT DIKAITKAN DENGAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA

**Muhammad Machshush Bil Izzi**[[1]](#footnote-0)\*

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

***Abstract***

*The disruption of technology has given rise to new entities in the business world called startups. The rapid growth of startups, on the other hand, is also overshadowed by the risk of bankruptcy due to external and internal factors in the competitive business environment. The bankruptcy of startups also has implications for the continuity of their business and the protection of personal data of their users who enjoy their products/services. In this research, the Author presents two problem formulations related to these conditions, namely the urgency of business continuity for the protection of personal data of users when a startup is declared bankrupt, and the juridical reconstruction of the protection of personal data of users by a bankrupt startup, linked to the principle of business continuity. The research uses a normative juridical method by examining primary and secondary legal materials to be subsequently analyzed through regulatory and conceptual approaches. The research findings indicate the need for expanding the meaning of business continuity in bankruptcy regulations, imposing responsibilities on startups to fulfill their obligations as controllers and/or processors of personal data. Additionally, a juridical reconstruction of the mechanism for protecting personal data of startup users is required when a startup is declared bankrupt."*

***Keywords***: *personal data protection; business continuity principle; startup; bankruptcy law*

**Intisari**

Disrupsi teknologi telah memunculkan entitas baru di dunia usaha bernama *startup*. Pertumbuhan *startup* yang pesat di sisi lain juga dibayang-bayangi kepailitan akibat dari faktor eksternal dan internal *startup* dalam persaingan usaha yang ketat. Kepailitan *startup* berimplikasi pula terhadap kelangsungan usaha *startup* dan perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang menikmati produk/layanannya. Dalam penelitian ini, Penulis mengemukakan 2 (dua) rumusan masalah terkait kondisi tersebut, yakni urgensi kelangsungan usaha untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna apabila *startup* dinyatakan pailit dan rekonstruksi yuridis perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup* yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan perluasan makna kelangsungan usaha dalam ketentuan undang-undang mengenai kepailitan yang memberikan tanggung jawab kepada *startup* memenuhi juga tanggung jawab sebagai pengendali dan/atau prosesor data pribadi dan diperlukan rekonstruksi yuridis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna *startup* ketika *startup* dinyatakan pailit.

**Kata Kunci**: perlindungan data pribadi; kelangsungan usaha; perusahaan rintisan; kepailitan.

### Pendahuluan

“Banyak perusahaan bermimpi mengubah dunia, tetapi sangat sedikit yang memiliki semua elemen yang diperlukan: bakat, sumber daya, dan ketekunan.” merupakan pesan yang disampaikan Satya Nadella kepada seluruh karyawannya ketika pertama kali menjadi CEO Microsoft.[[2]](#footnote-1) Dunia usaha dewasa ini telah tumbuh dan berubah dibanding 30–40 tahun yang lalu dengan adanya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi telah mengenalkan dunia usaha dengan entitas baru bernama perusahaan rintisan berbasis teknologi atau yang lebih dikenal dengan *startup*.[[3]](#footnote-2) Laporan terbaru dari Startup Ranking per Maret 2023 menunjukkan Indonesia berada di posisi ke-6 jumlah *startup* di dunia dengan rincian sebagai berikut: (i) Amerika Serikat berjumlah 77.384 *startup*; (ii) India berjumlah 17.140 *startup*; (iii) Inggris berjumlah 7.019 *startup*; (iv) Kanada berjumlah 3.900 *startup*; (v) Australia berjumlah 2.892 *startup*; dan (vi) Indonesia berjumlah 2.502 *startup*.[[4]](#footnote-3)

Perkembangan *startup* di Indonesia sendiri tidak terlepas dari fenomena *bubble* dot com pada awal abad ke-21 sebagai inovasi teknologi internet untuk mengidentifikasi dan mengoperasionalkan perusahaan melalui domain dot com, kemudian pada 2010 dengan munculnya perusahaan *marketplace* seperti Tokopedia dan Blanja.com menandai era baru perkembangan signifikan *startup* di Indonesia.[[5]](#footnote-4) Iklim pertumbuhan ekonomi digital sebagai faktor eksternal sekaligus menjadi faktor pendorong pertumbuhan *startup* di Indonesia karena mencakup kemudahan, kenyamanan, kecepatan, efisiensi, keamanan, dan fleksibilitas transaksi yang tidak terbatas waktu dan ruang.[[6]](#footnote-5) Sementara itu, faktor internal pertumbuhan *startup* dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni profit, ketenagakerjaan, dan kinerja pendanaan.[[7]](#footnote-6) Selain itu, pertumbuhan inovasi dan perkembangan *startup* tidak terlepas dari peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara diantaranya pajak perusahaan yang lebih rendah atau kredit pajak, penyediaan peluang pendanaan, hak kekayaan intelektual, serta undang-undang persaingan usaha.[[8]](#footnote-7)

Namun demikian, tantangan pertumbuhan *startup* dewasa ini telah menghadapi hambatan dalam hal keterbatasan akses pendanaan dan persaingan usaha yang ketat. Nailul Huda, peneliti INDEF, mengemukakan bahwa hal tersebut terjadi karena fenomena *bubble burst,* di mana pertumbuhan *startup* tidak sebanding dengan angka perusahaan pendanaan. Sementara itu, Aldi Adrian, Vice President of Investment MDI Ventures, mengatakan kondisi inflasi yang tinggi di beberapa negara dan rencana The Fed menaikkan suku bunga acuan membuat pemodal untuk bertindak *wait and see*.[[9]](#footnote-8) Lebih lanjut, Richard Bednár dan Natália Tarišková mengemukakan 5 (lima) indikator kegagalan *startup*, yakni (i) kekurangan dana untuk pengembangan lebih lanjut; (ii) produk/layanan yang ditawarkan kurang dibutuhkan di pasar; (iii) tidak ada investor dan terjebak pada pendanaan *bootstrapping*; (iv) permasalahan beban biaya; (v) tidak padunya sumber daya manusia.[[10]](#footnote-9) Carmine Giardino, *et al.* menekankan seringkali kegagalan *startup* dipicu ketidaksesuaian masalah dan solusi yang ditawarkan dalam produk/layanan dan menolak untuk belajar secara riil dengan mengajak pelanggan sebagai pengguna produk/layanan.[[11]](#footnote-10)

Kombinasi tantangan dan permasalahan lahir dan tumbuhnya *startup* tersebut banyak mengakibatkan pada kepailitan *startup*, padahal setiap perusahaan sejatinya memiliki prinsip *perpetual entity* bahwa perusahaan yang didirikan dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004), suasana batin latar belakang pembentukan UU 37/2004 didasarkan pada krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 yang mempengaruhi kelangsungan usaha sehingga mengakibatkan kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang. Namun, perkembangan dunia usaha dewasa ini banyak dipengaruhi oleh faktor multidimensi yang bersifat internal dan eksternal yang membuat *startup* sampai pada titik kebangkrutan atau dinyatakan pailit. Sebagai contoh, daftar *startup* yang bangkrut atau pailit di Indonesia diantaranya adalah Airy Rooms, Fabelio, JD.ID, Sorabel, Stoqo, Qlapa, CoHive, Beres.id.[[12]](#footnote-11) Permasalahan kemudian timbul ketika *startup* yang dinyatakan pailit masih yang melakukan pemrosesan data pribadi, bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan positif dapat menjelaskan dan memberikan jawaban atas permasalahan tersebut?

Berdasarkan kondisi dan pemaparan di atas, Penulis merasa penting untuk mengkaji dan membahas mengenai urgensi kelangsungan usaha ketika *startup* dinyatakan pailit untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna.[[13]](#footnote-12) Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. **Pertama**, mengapa kelangsungan usaha untuk dilakukannya perlindungan data pribadi pengguna diperlukan apabila *startup* dinyatakan pailit? **Kedua**, Bagaimana rekonstruksi yuridis perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup* yang dinyatakan pailit dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder, yakni buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang terkait dengan hukum kepailitan dan perlindungan data pribadi untuk kemudian dianalisis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).[[14]](#footnote-13) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan praktisi hukum, serta masyarakat umum untuk mengetahui dan mendalami mengenai perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit.

### Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Dasar Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Startup* yang Dinyatakan Pailit

1. **Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Start-Up* yang Dinyatakan Pailit**

Kemudahan berusaha kepada pelaku usahadengan pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan mendorong lahir dan tumbuhnya *startup-startup* di Indonesia. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023) mengubah ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) mengatur kemudahan berusaha bagi usaha mikro dan kecil untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.[[15]](#footnote-14) Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021) mengatur klasifikasi usaha sebagai berikut.[[16]](#footnote-15)

**Tabel 1. Kriteria Modal Usaha dalam PP 7/2021**

| **Klasifikasi Usaha** | **Modal Usaha[[17]](#footnote-16)** | **Hasil Penjualan Tahunan** |
| --- | --- | --- |
| Mikro | Paling banyak Rp1.000.000.000 | Paling banyak Rp2.000.000.000 |
| Kecil | >Rp1.000.000.000-Rp5.000.000.000 | >Rp2.000.000.000-Rp15.000.000.000 |
| Menengah | >Rp5.000.000.000-Rp10.000.000.000 | >Rp15.000.000.000-Rp50.000.000.000 |

Namun demikian, kemudahan berusaha tersebut bukan berarti tanpa risiko. Potensi terjadinya kepailitan menjadi sangat memungkinkan. Apalagi, dalam modal usaha didapatkan dari utang dan tidak dikelola dengan baik. Secara sederhana, syarat kepailitan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.[[18]](#footnote-17)

Infrastruktur hukum mengenai kemudahan dunia usaha demikian sejatinya menyisakan potensi permasalahan dimana *startup* sebagai sebuah tren yang terus bermunculan dimudahkan dengan ketentuan pengaturan pendirian Perseroan tersebut meski *startup* sendiri merupakan terminologi dan entitas yang tidak diatur secara khusus sehingga memberikan pilihan hukum dalam menentukan status atau bentuk hukum pendiriannya.[[19]](#footnote-18) Lebih lanjut, potensi terjadinya pelanggaran data pribadi menjadi besar karena infrastruktur *startup* yang tidak siap untuk terus beroperasional. Padahal, perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam dunia elektronik ataupun digital saat ini. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022) pada 17 Oktober 2022 merupakan rangkaian panjang rezim perlindungan data pribadi secara spesialis dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Dorongan dibentuknya UU 27/2022 saat Indonesia menjadi Presidensi G-20 dengan tujuan terpenuhinya prasyarat penyokong ekonomi digital, yakni arus data pribadi lintas negara, baik dari pihak penyelenggara negara maupun swasta menjadi isu yang perlu diatur secara komprehensif.[[20]](#footnote-19) Hal ini diperlukan karena dalam UU 19/2016 ataupun peraturan turunannya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkomifo 20/2016), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020) hanya mengatur pengaturan yang bersifat sektoral terhadap pihak swasta, belum diatur secara lengkap mengenai hak subjek data pribadi, konsep pengendali atau prosesor data pribadi, dan pengaturan pengenaan sanksi administratif yang tidak lengkap dimana tidak ada ketentuan pengenaan sanksi denda.[[21]](#footnote-20)

Konstruksi perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit sejatinya menjadi titik perpotongan pengaturan mengenai kepailitan dan perlindungan data pribadi. Ketika debitor dinyatakan pailit maka kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitor dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.[[22]](#footnote-21) Pengecualian terhadap ketentuan *a quo* ialah terhadap: (i) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; (ii) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau (iii) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.[[23]](#footnote-22)

Lebih lanjut, apabila membandingkan ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan terdapat konstruksi yang berbeda mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

**Tabel 2. Konstruksi Hak Data Pribadi**

| **Peraturan Perundang-undangan** | **Istilah Hak Data Pribadi** | **Sifat Hak Data Pribadi** | **Bagian Khusus** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UU 27/2022 | Subjek Data Pribadi | Kepemilikan individual | V | Terdapat bab khusus Hak Subjek Data Pribadi |
| PP 71/2019 | Pemilik Data Pribadi | Kepemilikan individual | X | Pengaturan hak data pribadi tersebar, misalnya *right to erasure* dan *right to delisting* |
| PP 80/2019 | Hak milik data pribadi | Kepemilikan pribadi atau Pelaku Usaha bersangkutan | X | Hanya mengatur kewajiban perlindungan data pribadi |
| Permenkominfo 5/2020 | Pemilik Data Pribadi | Kepemilikan individual | X | Tidak mengatur hak data pribadi dan hanya mengatur administrasi terhadap data pribadi |
| Permenkominfo 20/2016 | Pemilik Data Pribadi | Kepemilikan individual | V | Terdapat bab khusus Hak Pemilik Data Pribadi |

Berdasarkan tabel konstruksi hak data pribadi tersebut dikaitkan dengan ketentuan kepailitan *startup* akan memiliki implikasi yang berbeda mengenai konstruksi data pribadi, yang dalam kepailitan apakah termasuk objek sita umum atas kekayaan atau tidak,[[24]](#footnote-23) dan cara penanganannya sehingga Penulis kembali merujuk pada ketentuan peralihan dalam UU 27/2022 bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Data Pribadi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2022.[[25]](#footnote-24)

1. **Teori dan Asas Kelangsungan Usaha dalam Hukum Kepailitan**

Asas kelangsungan usaha pada taraf tertentu menjadi asas yang penting dalam menguji perkara kepailitan. Dalam UU 37/2004, asas kelangsungan usaha tidak ditempatkan dalam norma pengaturan, tetapi ditempatkan dalam Penjelasan Umum.[[26]](#footnote-25) Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyempitkan kedudukan Penjelasan dalam suatu undang-undang, yakni (i) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma; (ii) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; (iii) penjelasan umum memuat uraian sistematis latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan dan penjelasan pasal demi pasal tidak boleh bertentangan dengan materi pokok dalam batang tubuh, tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma, tidak melakukan pengulangan, dan tidak memuat rumusan pendelegasian; (iv) Bagian ketentuan umum yang memuat definisi tidak diperlukan penjelasan.[[27]](#footnote-26)

Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum merupakan pikiran dasar abstrak yang menjadi latar belakang peraturan konkret di belakang setiap sistem hukum dan terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai hukum positif dan dapat ditemukan sifat-sifat atau ciri-ciri umum dalam peraturan konkrit tersebut.[[28]](#footnote-27) Sejalan dengan hal tersebut Paul Scholten mengemukakan bahwa asas hukum (*rechtbeginsel*) bukan merupakan aturan hukum (*rechtsregel*) karena asas hukum terlalu umum sehingga bukanlah apa-apa apabila tidak diterapkan sebagai kaidah (*of niets of veel te veel zeide*).[[29]](#footnote-28) Berkaitan dengan hal tersebut, asas kelangsungan usaha sebagai bagian dari asas hukum harus dimaknai secara luas sebagai dasar penerapan hukum dan tidak terbatas pada aturan-aturan konkrit untuk memecahkan permasalahan hukum.

Dari segi keadilan distributif, asas kelangsungan usaha memiliki relevansi, yakni debitor yang dapat dipailitkan adalah debitor yang benar-benar dalam keadaan insolven, karena apabila debitor dalam keadaan jumlah asetnya masih dapat memenuhi kewajiban hutangnya dan usahanya/keuangannya sedang dalam keadaan positif atau normal maka dirasa tidak adil untuk menyatakan pailit hanya karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.[[30]](#footnote-29) Insolvensimenurut Sutan Remi Sjahdeini adalah keadaan debitor dengan jumlah seluruh utang kepada semua kreditornya melebihi jumlah nilai aset yang dimilikinya, sementara dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU 37/2004 insolvensi hanya dijelaskan sebagai “tidak mampu membayar” sehingga tidak jelas apa maksudnya tidak mampu membayar utang hanya kepada salah satu kreditor saja atau seluruh utangnya.[[31]](#footnote-30)

Konstruksi demikian menjelaskan bahwa asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan di Indonesia merupakan bagian integral dari UU 37/2004. Pemaknaan “memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan” perlu ditelaah melalui ketentuan UU 37/2004, sementara itu frasa ‘prospektif’ sendiri menurut KBBI memiliki arti ada harapan (baik). Beberapa ketentuan norma yang mengandung asas kepailitan dalam UU 37/2004 diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 3. Norma Pasal-Pasal UU 37/2004 yang Mengandung Penerapan Asas Kelangsungan Usaha**

| **Ketentuan norma Pasal** | **Bunyi pasal** |
| --- | --- |
| Pasal 56 ayat (3) | “Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan **Kurator** **dalam rangka kelangsungan usaha Debitor**, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” |
| Pasal 104 ayat (1) | Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, **Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit** walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. |
| Pasal 104 ayat (2) | Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, **Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha** sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
| Pasal 179 ayat (1) | Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, **Kurator atau Kreditor yang** **hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan**. |
| Pasal 184 ayat (2) | Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan |

Berdasarkan norma pasal-pasal kelangsungan usaha *a quo*, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kelangsungan usaha dari perusahaan Debitor tidak memberikan ruang kesempatan bagi Debitor itu sendiri dalam memenuhi kewajiban utangnya atau dengan kata lain kewenangan Kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit Debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 16 ayat (1) *jo.* Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004. Ketentuan *a quo* berbeda dengan dasar filosofi hukum kepailitan di Amerika Serikat yang didasarkan pada tujuan utama memberikan kesempatan bagi debitor memulai usahanya kembali agar terlepas dari utang yang lama.[[32]](#footnote-31) Konsep yang dikenal dengan *fresh start* tersebut diatur dalam *Chapter 7* dan *Chapter 11* *Bankruptcy Code* dengan dilakukan reorganisasi dan opsi-opsi bagi perusahaan untuk melakukan pemulihan dalam jangka waktu tertentu.[[33]](#footnote-32) Dengan ketentuan tersebut, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam perkara kepailitan diberikan kesempatan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor.

1. **Rekonstruksi Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Startup* yang Dinyatakan Pailit**
   * + 1. **Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Start-Up* yang Dinyatakan Pailit**

Penggunaan asas kelangsungan usaha pada perkara kepailitan yang terikat pada ketentuan-ketentuan dalam UU 37/2004 memberikan keterbatasan pada Debitor pailit yang dalam konteks ini adalah apabila *startup* yang dinyatakan pailit menjalankan usahanya. Akibat hukum bagi *startup* ketika dinyatakan pailit tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004, yakni *startup* kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.[[34]](#footnote-33) Akibat hukum lainnya adalah terhadap perikatan yang lahir setelah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Lebih lanjut, tuntutan hak atau kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator sehingga apabila diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit dan mengakibatkan penghukuman terhadap debitor maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.[[35]](#footnote-34) Berkaitan dengan hal tersebut, pertanggungjawaban perusahaan menjadi sangat penting dalam mengkonstruksi asas kelangsungan usaha terhadap perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang dinyatakan pailit.

Penulis menelaah setidaknya terdapat 2 (dua) doktrin pertanggungjawaban perusahaan yang relevan terhadap hal tersebut, yakni (i) doktrin *fiduciary duties* atau *duty to skill and care* dimana direksi dan manajer pelaksana diwajibkan berperilaku hati-hati sebagaimana ketika orang-orang pada posisi dan situasi yang sama berperilaku; dan (ii) doktrin manajemen ke dalam (*indoor management rule*) yang memiliki arti bahwa pihak eksternal perusahaan yang beritikad baik tidak dibebani tanggung jawab mengenai keabsahan internal pihak yang menjalankan perusahaan, melainkan pihak direksi atau pelaksana perusahaanlah yang bertanggungjawab atas tindakannya.[[36]](#footnote-35) Doktrin tanggung jawab perusahaan penting untuk dikaitkan dengan perlindungan data pribadi pengguna oleh *startup*. Penulis setidaknya memberikan 3 (tiga) alasan mengapa perusahaan tetap bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi pengguna bahkan ketika telah dinyatakan pailit daripada oleh kurator, yakni (i) *startup* lebih memahami pemrosesan data pribadi pengguna dengan sistem yang dibangunnya dibanding kurator sehingga apabila diperlukan tindakan hukum untuk melakukan perlindungan data pribadi pengguna maka *startup* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukannya; (ii) hubungan perlindungan data pribadi pengguna dengan *startup* merupakan hubungan persetujuan dari subjek data pribadi terhadap ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh *startup*; dan (iii) kewenangan kurator terbatas pada pengurusan dan pemberesan harta pailit dan tidak mencakup pada perlindungan data pribadi pengguna *startup*.

Argumentasi Penulis tersebut setidaknya didasarkan pada konstruksi dalam UU 27/2022 sebagai rezim utama perlindungan data pribadi. **Pertama**, kedudukan *startup* sebagai pengendali data pribadi dan/atau melibatkan prosesor data pribadi yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas kepentingan pemrosesan data.[[37]](#footnote-36) Misalnya, kebocoran data pribadi pengguna akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun karena ketidakpercayaan pengguna.[[38]](#footnote-37) Apabila merujuk pada ketentuan UU 27/2022 ataupun secara praktik mengenai kebocoran data pribadi, Pasal 46 ayat (1) UU 27/2022 mengatur bahwa apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib memberitahukan tertulis kepada subjek data pribadi dan lembaga.[[39]](#footnote-38) Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendali dan/atau prosesor data pribadi dalam konteks ini *startup* merupakan pihak yang dianggap paling mengerti mengenai perlindungan data pribadi terutama ketika melakukan pemrosesan data pribadi ataupun terjadi hal teknis yang mengganggu perlindungan data pribadi.

**Kedua**, kedudukan data pribadi sebagai hak subjek data pribadi bukan termasuk objek sita umum. UU 27/2022 mengkonstruksikan data pribadi merupakan seutuhnya milik subjek data pribadi secara personal.[[40]](#footnote-39) Meskipun, Pasal 1 angka 2 UU 27/22 mengenai definisi Perlindungan Data Pribadi dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi yang menurut hemat Penulis menjadikan data pribadi memiliki dimensi publik atau keterlibatan negara. Lebih lanjut, Haekal Al Asyari mengkonstruksikan 3 (tiga) hubungan antara negara, pelaku usaha, dan pengguna atau warga negara sebagai berikut: (i) hubungan antara negara dengan warga negara dalam kerangka kepentingan umum, negara menempatkan privasi sebagai perlindungan terhadap hak dasar warga negara dari segala gangguan yang juga mengakibatkan pada negara; (ii) hubungan warga negara dengan pelaku usaha, di mana kumpulan data pribadi termasuk juga kegiatan warga negara dikumpulkan dan dianalisis untuk pertimbangan perkembangan bisnis; dan (iii) hubungan negara dengan pelaku usaha yang memiliki dilema tersendiri, karena pelaku usaha memiliki paradigma melindungi privasi setiap penggunanya namun negara atas otoritasnya berwenang atas perlindungan data pribadi.[[41]](#footnote-40)

Dengan konstruksi demikian, penerapan asas kelangsungan usaha dalam UU 37/2004 secara limitatif berfokus pada pengurusan pemberesan harta pailit dan hanya dapat dilakukan ketika setelah putusan pernyataan pailit oleh kurator. Argumentasi Penulis menyatakan bahwa asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan perlu diperluas pemaknaannya terhadap itikad baik dari *startup* dan pengguna yang memberikan persetujuan atas data pribadinya untuk diselesaikan atau ditunaikan hak-haknya ketika *startup* dinyatakan pailit.

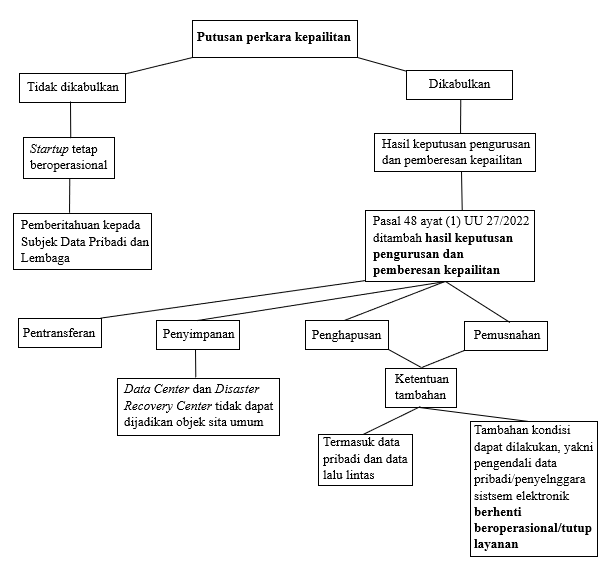
* + - 1. **Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Pengguna *Start-Up* yang Dinyatakan Pailit**

*Startup* dalam menjalankan usahanya diwajibkan melakukan perlindungan data pribadi pengguna dalam kedudukannya sebagai pengendali data pribadi atau melibatkan prosesor data pribadi. UU 27/2022 mengatur dalam hal pengendali data pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum maka pengendali wajib memberitahukan pengalihan data pribadi sebelum dan sesudah perbuatan hukum tersebut dilakukan.[[42]](#footnote-41) Lebih lanjut, ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4) UU 27/2022 mengatur secara khusus badan hukum yang melakukan pembubaran atau dibubarkan kemudian dilakukan penyimpanan, pentransferan, penghapusan, atau pemusnahan data pribadi wajib diberitahukan kepada subjek data pribadi.

Pengaturan *a quo* menurut hemat Penulis terdapat beberapa persoalan yang signifikan. **Pertama**, ketentuan *a quo* hanya diperuntukan kepada *startup* yang berstatus badan hukum sementara *startup* yang tidak berbadan hukum belum diatur atau tidak tercakup apabila terjadi perubahan status hukum dalam hal ini misalnya dinyatakan pailit. **Kedua**, terjadi persoalan ketika Pasal 48 ayat (3) UU 27/2022 apabila pemberitahuan hasil dari pelaksanaan perlindungan data pribadi ketika badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan yang dapat diartikan sebagai salah satu akibat *startup* dinyatakan pailit. Apabila dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU 37/2004 menurut hemat Penulis terjadi permasalahan norma, yakni apabila merujuk Penjelasan pasal *a quo* maka didapati penjelasan sebagai berikut: “Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, **organ perseroan tersebut tetap berfungsi** dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.” Permasalahan pertama adalah penjelasan tersebut membuat norma baru dengan ketentuan “organ perseroan tersebut tetap berfungsi” padahal berdasarkan UU 12/2011 penjelasan yang demikian tidaklah diperbolehkan, permasalahan kedua adalah apabila dikaitkan dengan *startup* maka keberlakuan penjelasan hanya pada *startup* dengan status sebagai Perseroan Terbatas, padahal *startup* merupakan entitas yang belum secara khusus dalam sistem hukum di Indonesia sehingga menyempitkan kewajiban bagi *startup* dalam melaksanakan perlindungan data pribadi pengguna. **Ketiga**, berkaitan dengan persoalan kedua, yakni kewenangan perlindungan data pribadi dan jangka waktu apabila upaya perlindungan data pribadi belum selesai dilaksanakan ketika *startup* dinyatakan pailit maka berdasarkan ketentuan UU 37/2004 kewenangan beralih ke kurator sementara Penulis berpendapat *startup*-lah yang mengerti segi teknis perlindungan data pribadi pengguna.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Penulis merumuskan rekonstruksi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme perlindungan data pribadi apabila *startup* kemudian dinyatakan pailit yang dikaitkan dengan asas kelangsungan usaha melalui bagan dibawah ini.

**Bagan 1. Rekonstruksi Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Ketika *Startup* Dinyatakan Pailit**



Berdasarkan bagan tersebut Penulis menguraikan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, rumusan ketentuan UU 37/2004 yang menyatakan debitor pailit dalam penelitian ini *startup* tidak mempunyai hak menguasai dan mengurus harta pailitnya harus direvisi dan menegaskan bahwa badan hukum dan/atau badan usaha yang mencakup status hukum *startup* tetap dapat melangsungkan usahanya selama bukan termasuk harta pailit dan diperuntukkan perlindungan terhadap pihak ketiga atau konsumen/pengguna produk/layanan. **Kedua**, konstruksi Pasal 48 ayat (1) UU 27/2022 mengenai terjadinya perbuatan hukum pada badan hukum dan/atau badan usaha yang mencakup status hukum *startup*, selain dan tidak terbatas melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran diperlukan penambahan norma mengenai hasil keputusan pengurusan dan pemberesan kepailitan. **Ketiga**, tindakan hukum perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan pentransferan, penyimpanan, penghapusan, dan/atau pemusnahan.[[43]](#footnote-42) **Keempat**, penyimpanan data pribadi yang membutuhkan pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) pada badan hukum dan/atau badan usaha yang termasuk status hukum *startup* tidak dapat dijadikan objek sita umum kepailitan.[[44]](#footnote-43) **Kelima**, pemusnahan data pribadi juga harus termasuk informasi pengguna sistem elektronik (*subscriber information*) yang memiliki atau membentuk personifikasi terhadap subjek data pribadi dan kondisi dapat dilakukan pemusnahan data pribadi termasuk ketika *startup* benar-benar berhenti beroperasional/tutup layanan.[[45]](#footnote-44) Dengan rekonstruksi demikian, *startup* dengan itikad baiknya dapat melangsungkan usahanya agar pengguna *startup* yang dinyatakan pailit akan mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam asas-asas perlindungan data pribadi yang tercantum dalam Pasal 3 UU 27/2022.

### Penutup

### Kesimpulan

*Startup* sebagai entitas baru dalam dunia usaha terus lahir bermunculan dan bertumbuh seiring perkembangan teknologi. Indonesia dengan jumlah *startup* ke-6 terbanyak di dunia mendapat peluang sekaligus tantangan terhadap kondisi tersebut. Pembaharuan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memudahkan berusaha bagi pelaku usaha bukan berarti tanpa risiko. *Startup* yang tidak siap menghadapi permasalahan yang berasal dari faktor eksternal dan internalnya bukan tidak mungkin berada dalam bayang-bayang kepailitan, apalagi *startup* yang modal usahanya didasarkan pada utang. Permasalahan yang muncul kemudian adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna apabila *startup* kemudian dinyatakan pailit. UU 37/2004 menyempitkan kesempatan kepada *startup* ketika dinyatakan pailit untuk melangsungkan usahanya dengan segala akibat hukumnya terutama pada harta pailit. Padahal asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UU 37/2004 juga merupakan salah satu asas hukum yang penting untuk dimaknai juga terhadap perlindungan data pribadi.

Penerapan asas kelangsungan usaha diperlukan kepada *startup* yang dinyatakan pailit dengan iktikad baik untuk melakukan perlindungan data pribadi. *Startup* menurut UU 27/2022 dapat didudukkan sebagai pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi sehingga memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi yang dimaksudkan untuk menjamin hak konstitusional yang melekat pada subjek data pribadi juga berimplikasi pada data pribadi di satu sisi berdimensi publik, di sisi lain berdimensi privat sehingga tidak dapat dijadikan objek sita umum kepailitan. Beberapa persoalan norma yang terkandung dalam UU 37/2004 dan UU 27/2022 dalam mengkonstruksi perlindungan data pribadi pengguna *startup* yang dinyatakan pailit disebabkan karena limitasi pada ketentuan-ketentuan norma yang mengandung kelangsungan usaha dan pertentangan norma konstruksi perlindungan data pribadi ketika *startup* yang dinyatakan pailit. Oleh karena itu, rekonstruksi yuridis yang diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi ketika *startup* dinyatakan pailit mencakup mengenai perluasan asas kelangsungan usaha untuk memberikan kewenangan bagi *startup* tetap beroperasional dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini perlindungan data pribadi pengguna dan mekanisme perlindungan data pribadi melalui penambahan ketentuan jenis data pribadi dan informasi pengguna, fasilitas pemrosesan data tidak dimasukkan dalam objek sita umum, dan tindakan hukum yang dapat dilakukan guna melindungi data pribadi pengguna.

* + - 1. **Saran**

Penulis memberikan saran pada permasalahan dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut. **Pertama**, bagi regulator harus memperbaiki ketentuan yang mengandung asas kelangsungan usaha dan perlindungan data pribadi dalam perkara kepailitan yang setidaknya mencakup pada 2 (dua) aspek, yakni ketentuan perluasan makna asas kelangsungan usaha dalam norma-norma hukum kepailitan dan konstruksi yuridis mekanisme perlindungan data pribadi ketika perusahaan dalam hal ini *startup* dinyatakan pailit. **Kedua**, bagi *startup* wajib dengan itikad baik melakukan perlindungan data pribadi yang berkesinambungan dalam setiap kegiatan operasionalnya kepada pengguna *startup*. **Ketiga**, bagi pengguna *startup* atau warga negara harus memperhatikan hak-hak yang melekat padanya sebagai subjek data pribadi dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi terutama ketika terjadi perbuatan hukum *startup* dinyatakan pailit.

1. **Bibliografi**

Asyari, Haekal Al. “Privacy as Public Good: Addressing the Common Interest in Data Protection.” Currentul Juridic 93, no. 2 (2023): 45.

Bednár, Richard dan Natália Tarišková. “Indicators of Startup Failure.” International Scientific Journal “Industry 4.0” 2, no. 5 (2017): 239-240.

Belu. “ELSAM Dorong Akselerasi Pembahasan RUU PDP Jelang G20.” Antara News. Diakses pada 29 Juli 2023. https://www.antaranews.com/berita/2894985/elsam-dorong-akselerasi-pembahasan-ruu-pdp-jelang-g20.

Corbae, Dean dan Pablo D’Erasmo. “Reorganization or Liquidatio: Bankruptcy Choice and Firm Dynamics.” National Bureau of Economic Research (Juni 2017): 38.

Dewi, Intan Rakhmayanti. “8 Startup RI yang Pernah Terkenal Sekarang Tutup dan Bangkrut.” CNBC Indonesia. Diakses pada 28 Juli 2023. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230411104245-37-428863/8-startup-ri-yang-pernah-terkenal-sekarang-tutup-dan-bangkrut.

Giardino, Carmine, Xiaofeng Wang, dan Pekka Abrahamsson. “Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework.” International Conference of Software Business (2014): 10-11.

Hermanto, Bagus, Nyoman Mas Aryani, Ni Luh Gede Astariyani. “Penegasan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 3 (September 2020): 260.

Horne, Jannic dan Klaus Fichter. “Growing for Sustainability: Enablers for the Growth of Impact Startups Conceptual Framework, Taxonomy, and Systematic Literature Review.” Journal of Cleaner Production 349 (15 Mei 2022): 10-11.

Irianto, Catur. “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).” Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 3 (November 2015): 413.

Kautsar, Izzy Al dan Danang Wahyu Muhammad. “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif.” Jurnal Panorama Hukum 5, no. 2 (Desember 2020): 190-191.

Kharisma, Dona Budi. “Membangun Kerangka Pengaturan Startup di Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding 10, no. 3 (Desember 2021): 438-439.

Koswara, Wenderlin. “Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (Agustus 2022): 91.

Kristomuljono, Ryan. “Mengenal Sejarah Perkembangan Startup di Indonesia.” Toffeedev. Diakses pada 28 Juli 2023. https://toffeedev.com/blog/perkembangan-startup-di-indonesia/.

Lubis, M. Faisal Rahendra. “Pertanggungjawaban Direksi di Suatu Perseroan terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.” Jurnal Hukum Kaidah 17, no. 2 (2018): 39-40.

Maharani, Shinta dan Miftahul Ulum. “Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia.” Conference on Islamic Studies (2019): 7-8.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta: 2004.

Microsoft.com Editor. “Satya Nadella email to employees on first day as CEO.” Microsoft News. Diakses pada 28 Juli 2023, https://news.microsoft.com/2014/02/04/satya-nadella-email-to-employees-on-first-day-as-ceo/.

Mulachela, Husen. “Pengertian Startup, Istilah, dan Bedanya dengan Bisnis Konvensional,” Katadata.co.id, diakses pada 28 Juli 2023, https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/6110a5251ff83/pengertian-startup-istilah-dan-bedanya-dengan-bisnis-konvensional.

Naurah, Nada. “Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Startup Terbanyak, Capai 2500-an pada 2023.” GoodStats. Diakses pada 28 Juli 2023. https://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-negara-dengan-startup-terbanyak-capai-2500-an-pada-2023-4r76M.

Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum.” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (Februari 2021): 9-11.

Okrah, James, Alexander Nepp, dan Ebenezer Agbozo. “Exploring the Factors of Startup Success and Growth.” The Business and Management Review 9, no. 3: 325.

Pangesti, Shinta. “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19.” Jurnal Rechtsvinding 10, no. 1 (April 2021): 123.

Primadhyta, Safyra. “Jejak Startup di Indonesia: Dari Booming Sampai ‘Gugur’.” CNN Indonesia. Diakses pada 28 Juli 2023. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jejak-startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur/2.

Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376).

Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619).

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420).

Setiawan, Hezkiel Bram dan Fatma Ulfatum Najicha. “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 1 (Juni 2022): 979.

Sulasno, Rokilah. “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukann Peraturan Perundang-Undangan.” Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi 5, no. 2 (Desember 2021): 183.

Surjanto, Diana. “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas 3, no. 2 (Oktober 2018): 266.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).

1. \* Alamat korespondensi: muhammad.machshush.bil.izzi@mail.ugm.ac.id [↑](#footnote-ref-0)
2. Microsoft.com Editor, “Satya Nadella email to employees on first day as CEO,” *Microsoft News*, diakses pada 28 Juli 2023, https://news.microsoft.com/2014/02/04/satya-nadella-email-to-employees-on-first-day-as-ceo/. [↑](#footnote-ref-1)
3. Husen Mulachela, “Pengertian Startup, Istilah, dan Bedanya dengan Bisnis Konvensional,” *Katadata.co.*id, diakses pada 28 Juli 2023, https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/6110a5251ff83/pengertian-startup-istilah-dan-bedanya-dengan-bisnis-konvensional. [↑](#footnote-ref-2)
4. Nada Naurah, “Indonesia Masuk Jajaran Negara dengan Startup Terbanyak, Capai 2500-an pada 2023,” *GoodStats*, diakses pada 28 Juli 2023, *https*://goodstats.id/article/indonesia-masuk-jajaran-negara-dengan-startup-terbanyak-capai-2500-an-pada-2023-4r76M. [↑](#footnote-ref-3)
5. Ryan Kristomuljono, “Mengenal Sejarah Perkembangan Startup di Indonesia,” *Toffeedev*, diakses pada 28 Juli 2023, https://toffeedev.com/blog/perkembangan-startup-di-indonesia/. [↑](#footnote-ref-4)
6. [Shinta](https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cois/article/viewFile/7981/3634) Maharani dan Miftahul Ulum, “Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia,” *Conference on Islamic Studies* (2019): 7-8. [↑](#footnote-ref-5)
7. [Jannic](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622007946) Horne dan Klaus Fichter, “Growing for Sustainability: Enablers for the Growth of Impact Startups Conceptual Framework, Taxonomy, and Systematic Literature Review,” *Journal of Cleaner Production* 349 (15 Mei 2022): 10-11. [↑](#footnote-ref-6)
8. [James](https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/2019-07-14-09-58-17-AM.pdf) Okrah, Alexander Nepp, dan Ebenezer Agbozo, “Exploring the Factors of Startup Success and Growth,” *The Business and Management Review* 9, no. 3: 235. [↑](#footnote-ref-7)
9. Safyra Primadhyta, “Jejak Startup di Indonesia: Dari Booming Sampai ‘Gugur’” *CNN Indonesia*, diakses pada 28 Juli 2023, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220530150050-92-802731/jejak-startup-di-indonesia-dari-booming-sampai-mulai-gugur/2. [↑](#footnote-ref-8)
10. Richard Bednár dan Natália Tarišková, “Indicators of Startup Failure,” *International Scientific Journal “Industry 4.0”* 2, no. 5 (2017): 239-240. [↑](#footnote-ref-9)
11. [Carmine](https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1709/1709.04749.pdf) Giardino, Xiaofeng Wang, dan Pekka Abrahamsson, “Why Early-Stage Software Startups Fail: A Behavioral Framework,” *International Conference of Software Business* (2014): 10-11. [↑](#footnote-ref-10)
12. Intan Rakhmayanti Dewi, “8 Startup RI yang Pernah Terkenal Sekarang Tutup dan Bangkrut,” *CNBC Indonesia*, diakses pada 28 Juli 2023, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230411104245-37-428863/8-startup-ri-yang-pernah-terkenal-sekarang-tutup-dan-bangkrut. [↑](#footnote-ref-11)
13. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) mengatur perlindungan data pribadi sebagai “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. [↑](#footnote-ref-12)
14. [Yati](about:blank) Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Februari 2021): 9-11. [↑](#footnote-ref-13)
15. Pasal 153A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841). [↑](#footnote-ref-14)
16. Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 1 (April 2021): 123. [↑](#footnote-ref-15)
17. Dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619) mengatur bahwa modal usaha yang dimiliki jenis usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. [↑](#footnote-ref-16)
18. Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443), “Debitor yang mempunyai **dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan** apabila terdapat fakta atau keadaan **yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” [↑](#footnote-ref-17)
19. Dona Budi Kharisma, “Membangun Kerangka Pengaturan *Startup* di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 3 (Desember 2021): 438-439. [↑](#footnote-ref-18)
20. Belu, “ELSAM Dorong Akselerasi Pembahasan RUU PDP Jelang G20,” *Antara News*, diakses pada 29 Juli 2023, https://www.antaranews.com/berita/2894985/elsam-dorong-akselerasi-pembahasan-ruu-pdp-jelang-g20. [↑](#footnote-ref-19)
21. Wenderlin Koswara, “Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum,” *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (Agustus 2022): 91. [↑](#footnote-ref-20)
22. Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [↑](#footnote-ref-21)
23. Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [↑](#footnote-ref-22)
24. Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Kepailitan adalah **sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit** yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” [↑](#footnote-ref-23)
25. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. [↑](#footnote-ref-24)
26. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan asas kelangsungan usaha sebagai “Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang **memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan**.” [↑](#footnote-ref-25)
27. Bagus Hermanto, Nyoman Mas Aryani, Ni Luh Gede Astariyani, “Penegasan Penjelasan Suatu Undang-Undang: Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (September 2020): 260. [↑](#footnote-ref-26)
28. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta: 2004), 5-6. [↑](#footnote-ref-27)
29. Rokilah, Sulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukann Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi* 5, no. 2 (Desember 2021): 183. [↑](#footnote-ref-28)
30. Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, “Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif,” *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 2 (Desember 2020): 190-191. [↑](#footnote-ref-29)
31. Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas* 3, no. 2 (Oktober 2018): 266. [↑](#footnote-ref-30)
32. Catur Irianto, “Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (November 2015): 413. [↑](#footnote-ref-31)
33. Dean Corbae dan Pablo D’Erasmo, “Reorganization or Liquidatio: Bankruptcy Choice and Firm Dynamics,” *National Bureau of Economic Research* (Juni 2017): 38. [↑](#footnote-ref-32)
34. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” [↑](#footnote-ref-33)
35. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [↑](#footnote-ref-34)
36. M. Faisal Rahendra Lubis, “Pertanggungjawaban Direksi di Suatu Perseroan terbatas Ketika Terjadi Kepailitan pada Umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,” *Jurnal Hukum Kaidah* 17, no. 2 (2018): 39-40. [↑](#footnote-ref-35)
37. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi membedakan antara Pengendali Data Pribadi dengan Prosesor Data Pribadi. Pengendali Data Pribadi berdasarkan Pasal 1 angka 4 didefinisikan sebagai “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam **menentukan** **tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi**.” Sementara Prosesor Data Pribadi didefinisikan sebagai “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama **dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi**.” [↑](#footnote-ref-36)
38. Hezkiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatum Najicha, “Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Juni 2022): 979. [↑](#footnote-ref-37)
39. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. [↑](#footnote-ref-38)
40. Bab IV Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur secara khusus mengenai Hak Subjek Data Pribadi yang dapat diartikan bahwa Data Pribadi melekat pada Subjek Data Pribadi, sehingga segala penggunaan dan peruntukannya, baik oleh dan untuk dirinya sendiri maupun pihak lain merupakan penguasaan dari Subjek Data Pribadi atau setidak-tidaknya memerlukan izin persetujuannya. [↑](#footnote-ref-39)
41. Haekal Al Asyari, “Privacy as Public Good: Addressing the Common Interest in Data Protection,” *Currentul Juridic* 93, no. 2 (2023): 45. [↑](#footnote-ref-40)
42. Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. [↑](#footnote-ref-41)
43. Penjelasan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan “memusnahkan adalah tindakan untuk menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.” [↑](#footnote-ref-42)
44. Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829) mengatur pusat data merupakan suatu fasilitas untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data, sementara pusat pemulihan bencana merupakan fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi, serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik akibat terganggu atau rusak yang disebabkan bencana alam dan/atau manusia. [↑](#footnote-ref-43)
45. Lihat Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1376) mengatur Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) sebagai “Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasikan lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.” [↑](#footnote-ref-44)